



Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Dhian Novitasari

Bicara Ibu Pahlawan Keluarga hingga Jaminan Anggaran Kesehatan

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Dhian Novitasari menaruh perhatian terhadap kiprah perempuan dan ibu. Menurut Dhian, dewasa ini ibu-ibu kerap berada di garda terdepan peningkatan kemampuan dan kemandirian keluarga. Itulah pentingnya peran perempuan.



Universal health coverage (UHC) sebesar 98 persen untuk warga tanpa melihat status sosial. Ini bentuk komitmen kami bersama pemkot memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Jogja."

DHIAN NOVITASARI
Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta

"DI belakang kuatnya laki-laki ada perempuan yang hebat. Peran istri sangat berarti membantu suksesnya suami. Ibu-ibu berperan sebagai pahlawan keluarga," ucap Dhian.

Sebagai satu-satunya pimpinan dewan perempuan, karena kedudukannya secara *ex officio* juga menjabat wakil ketua Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta. Dia termasuk aktif menghadiri rapat-rapat badan anggaran. Khususnya saat membahas APBD TA 2024.

Dari pembahasan total anggaran disepakati Rp 2,074 triliun. Masalah penanganan sampah menjadi perhatian dewan. Tahun lalu melalui APBD Perubahan TA 2023 dialokasikan anggaran Rp 4 miliar. Sedangkan tahun ini, 2024 dianggarkan Rp 24 miliar.

"Digunakan untuk optimalisasi pengurangan dan normalisasi sampah di Kota Yogyakarta yang dilakukan di triwulan pertama 2024," terang Dhian.

Sedangkan anggaran pendidikan posisinya 24 persen dari postur APBD TA 2024. Dengan begitu, anak-anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun di Kota Jogja tidak ada alasan apapun tidak bisa sekolah karena biaya. Adapun anggaran kesehatan 15 persen dari total APBD. Warga Kota Jogja, sambung

Dhian tidak perlu khawatir harus menjalani perawatan di rumah sakit.

"Universal health coverage (UHC) sebesar 98 persen untuk warga tanpa melihat status sosial. Ini bentuk komitmen kami bersama pemkot memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Jogja," tegasnya. Komitmen itu ditambah premi BPJS kesehatan kelas tiga dibiayai APBD TA 2024.

Mengemban tugas sebagai wakil rakyat, Dhian sering turun ke bawah. Dia aktif berbicara dengan berbagai elemen. Terutama para perempuan dan ibu-ibu. Dia mengaku senang bisa berdiskusi dan bicara dari hati ke hati. Itu seperti beberapa kali dilakukan saat bertemu dengan beberapa ibu rumah tangga yang menjadi ketua kelompok keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Dhian mengungkapkan, PKH merupakan program Kementerian Sosial RI. PKH berlangsung sejak 2007. PKH berupa program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak memanfaatkan berbagai fasilitas layanan



ANGGARAN PRORAKYAT: Dhian Novitasari saat memimpin rapat kerja membahas APBD TA 2024 Kota Yogyakarta. Pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian.

kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

Dengan PKH, keluarga miskin didorong memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi. Juga perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya. PKH diharapkan

dapat berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin kesenjangan (*gini ratio*) dan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Dhian kemudian menyinggung soal graduasi sebagai tanda berakhirnya kepesertaan keluarga penerima manfaat PKH. Graduasi terbagi menjadi dua jenis. Pertama, graduasi alamiah karena berakhirnya kepesertaan disebabkan kondisi keluarga penerima manfaat PKH sudah tidak memenuhi kriteria kepesertaan. Misalnya, tak

memiliki pengurus kepesertaan, tak punya salah satu komponen kepesertaan seperti kesehatan, pendidikan atau kesejahteraan sosial.

"Kedua, graduasi mandiri karena berakhirnya kepesertaan keluarga penerima manfaat PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat," katanya.

Selanjutnya, dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH. Graduasi mandiri dapat terjadi karena inisiatif sendiri maupun dorongan pendamping maupun pihak lainnya. "Keluarga penerima manfaat menolak bantuan karena merasa mampu. Tidak ingin bergantung pada bantuan sosial PKH, dan atau ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain," paparnya.

Keluarga penerima manfaat mengalami perubahan status ekonomi menjadi sejahtera karena mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik. Proses graduasi antara lain bertujuan mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan, memastikan penerima bantuan sosial PKH tepat sasaran dan meminimalisasi timbulnya kesenjangan sosial serta mewujudkan rasa keadilan sosial. (**kus/by**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005